



# BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG  
PEDOMAN PENETAPAN PETUGAS HAJI DAERAH (PHD)  
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan, dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah Haji dengan menunjuk petugas operasional Petugas Haji Daerah (PHD) Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa dalam rangka memilih dan menetapkan calon Petugas Haji Daerah (PHD) yang terdiri dari, Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) Kabupaten Kubu Raya perlu dilakukan secara selektif dan transparan dalam upaya menghasilkan petugas yang benar-benar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji Kabupaten Kubu Raya, untuk itu perlu diatur Pedoman Penetapan Petugas Haji Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Petugas Haji Daerah (PHD) Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Sosial, Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga serta Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PETUGAS HAJI DAERAH (PHD) KABUPATEN KUBU RAYA.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan dan terkait dengan penyeleksian petugas Haji Daerah.
6. Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
7. Calon Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam, memenuhi syarat dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
8. Pembinaan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan dan bimbingan tentang haji.
9. Petugas Haji Daerah yang selanjutnya disebut PHD adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang telah memberikan dedikasi yang tinggi dalam melakukan pembinaan umat Islam.
10. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disebut TPHD adalah petugas yang memandu jemaah haji Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan perjalanan ibadah haji.
11. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disebut TKHD adalah petugas yang memberikan pelayanan kepada jemaah haji Kabupaten Kubu Raya.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Seleksi petugas haji daerah (PHD) dilakukan berdasarkan asas keadilan, profesional, transparan dan akuntabel dalam upaya menghasilkan petugas yang memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah haji Kabupaten Kubu Raya.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Petugas haji daerah (PHD) bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

### BAB III WEWENANG DAN KEANGGOTAAN

#### Bagian Kesatu Wewenang

##### Pasal 4

- (1) Bupati memiliki kewenangan untuk menunjuk dan menetapkan PHD.
- (2) Bupati dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim seleksi calon PHD bertugas melakukan seleksi terhadap calon PHD dan mengusulkannya kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan anggota Asisten yang membidangi pembinaan mental spritual, dan pihak lainnya yang berkompeten berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (5) Tim seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat tim yang terdiri dari unsur staf sekretariat daerah yang menangani tugas perumusan kebijakan pembinaan mental spritual pada Sekretariat Daerah.

#### Bagian Kedua Keanggotaan

##### Pasal 5

Keanggotaan PHD terdiri dari:

- (1) PHD terdiri dari TPHD dan TKHD
- (2) TPHD berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Orang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kabupaten Kubu Raya, yang memiliki prestasi dalam bekerja dan 4 (empat) orang yang berasal dari anggota masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan ibadah haji serta mempunyai dedikasi tinggi dalam pembinaan umat Islam di Kabupaten Kubu Raya.
- (3) TKHD berjumlah 1 (satu) orang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya yang berlatarbelakang pendidikan kesehatan yang bertugas dibidang kesehatan.

### BAB IV PERSYARATAN

##### Pasal 6

TPHD dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memenuhi syarat antara lain:

- a. Warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam;
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya yang memiliki dedikasi dan prestasi kerja yang baik;
- c. Masa kerja minimal 15 tahun sejak diangkat sebagai CPNS;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan kesehatan oleh Dokter yang berwenang;
- e. Diutamakan memiliki sikap dan ketaqwaan yang tinggi kepada Allah SWT;
- f. Lulus seleksi yang diadakan oleh tim seleksi.

## Pasal 7

TPHD dari anggota masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat harus memenuhi syarat antara lain :

- a. Warga negara Republik Indonesia penduduk Kabupaten Kubu Raya yang beragama Islam;
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan kesehatan yang diberikan oleh Dokter yang berwenang;
- c. Memiliki kualifikasi kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan bimbingan ibadah haji;
- d. Memiliki dedikasi terhadap bidang keagamaan dan kemasyarakatan;
- e. Diutamakan dapat menguasai bahasa arab minimal pasif dan atau bahasa asing lainnya;

## Pasal 8

TKHD harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga negara Republik Indonesia beragama Islam;
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan kesehatan oleh Dokter yang berwenang;
- c. Masa kerja minimal 15 tahun sejak diangkat sebagai CPNS;
- d. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya yang memiliki kualifikasi pendidikan bidang kesehatan;
- e. Diutamakan yang pernah melaksanakan ibadah umrah/haji;
- f. Diutamakan memiliki sikap dan ketaqwaan yang tinggi kepada Allah SWT;
- g. Diutamakan menguasai bahasa arab minimal pasif dan atau bahasa asing lainnya;

## BAB V TATA CARA

### Pasal 9

- (1) Tim seleksi calon Petugas Haji Daerah melakukan penjangkaran terhadap pihak-pihak yang memenuhi persyaratan, baik melalui masukan dari masyarakat maupun permohonan dari perorangan yang berminat.
- (2) Nama-nama calon dari hasil penjangkaran dan permohonan yang masuk, dihimpun oleh sekretariat tim yang selanjutnya akan dilakukan seleksi.
- (3) Tim seleksi melaksanakan seleksi administrasi dan dapat menggunakan seleksi berupa test tertulis dan/atau test tidak tertulis.
- (4) Hasil seleksi ditetapkan oleh tim seleksi dan selanjutnya diusulkan kepada Bupati.

### Pasal 10

Tim Seleksi bertugas melakukan seleksi baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis serta memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap calon PHD dan menetapkan 2 (dua) kali lipat dari jumlah calon PHD yang dibutuhkan.

### Pasal 11

Sekretariat tim Seleksi bertugas menerima dan menghimpun nama-nama warga negara yang memenuhi persyaratan dan selanjutnya mempersiapkan rapat-rapat dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim Seleksi dalam rangka pelaksanaan tugasnya.



## **BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Bagian Kesatu Tugas**

#### **Pasal 12**

- (1) TPHD bertugas memandu, mengarahkan dan melayani keperluan jamaah haji daerah mulai dari pemberangkatan, pelaksanaan sampai kepulangan jamaah haji daerah.
- (2) TKHD bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji Kabupaten Kubu Raya dan memberikan rekomendasi perawatan lanjutan kepada Tim Kesehatan Haji Indonesia terhadap jamaah haji daerah Kabupaten Kubu Raya yang memerlukan pertolongan lebih lanjut mulai dari pemberangkatan sampai kepulangan jamaah.

### **Bagian Kedua Tanggung Jawab**

#### **Pasal 13**

PHD bertanggung jawab atas kenyamanan dan keamanan jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

## **BAB VII HAK**

#### **Pasal 14**

Setiap anggota PHD berhak diberikan biaya Ongkos Naik Haji (ONH), biaya lokal dan biaya komunikasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 15**

Seseorang yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagai Petugas Haji Daerah (PHD) tidak dapat mengikuti seleksi calon PHD pada tahun berikutnya.

#### **Pasal 16**

Anggota PHD dilarang menjadi mahram bagi keluarganya yang bersamaan dengannya melaksanakan ibadah haji.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Petugas Haji Daerah (PHD) Kabupaten Kubu Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 29-3-2011

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30/3/2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

**HUSEIN SYAUWIK**  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 14